

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis pajak dan peramalan pendapatan sangat penting bagi pemerintah dalam memastikan stabilitas dalam kebijakan pajak dan pengeluaran (Jenkins et al., 2000). Pentingnya penerimaan pajak sebagai pendapatan pemerintah pusat dan daerah terlihat juga pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Besarnya anggaran negara, ditambah dengan kebutuhan anggaran yang seimbang yang berlaku untuk sebagian besar pemerintah, menggarisbawahi pentingnya untuk memperoleh perkiraan pendapatan yang akurat (Mocan and Azad, 1995). Prediksi pendapatan yang berlebihan dapat menghasilkan kesulitan politik yang serius karena dapat memaksa inisiasi pemotongan pelayanan publik yang sebelumnya dianggarkan dan menghasilkan kenaikan pajak yang tidak diinginkan. Sebuah *underprediction* dari pendapatan juga dapat membuat masalah karena menyebabkan kekurangan dana pelayanan publik (Mocan and Azad, 1995).

Besaran proyeksi penerimaan pajak penting untuk didiskusikan karena dua hal. Pertama, setiap negara membutuhkan informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, terutama dalam kaitannya dengan arah kebijakan fiskal yang akan diambil. Kedua, penentuan besaran target penerimaan pajak yang spesifik, terukur dan terjustifikasi dengan baik akan membantu otoritas pajak menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal sesuai dengan prinsip-prinsip universal pemungutan pajak. Dengan demikian, adalah wajar jika hampir semua otoritas pajak sangat berkepentingan untuk

mengetahui seberapa besar target penerimaan pajak yang dibebankan kepada mereka (Arifin, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh IMF tahun 2005 terhadap 34 negara dengan kategori *low-income* menunjukkan bahwa sangat sedikit negara yang memiliki acuan dan aturan formal yang menjelaskan bagaimana proses penentuan target penerimaan pajak dan menjelaskan secara tegas apa yang menjadi tanggung jawab otoritas pajak dalam proses tersebut. Selain itu, studi tersebut juga menunjukkan bahwa dalam membuat proyeksi penerimaan pajak negara-negara dimaksud menggunakan teknik estimasi yang sederhana. Tidak seperti halnya negara-negara maju yang cenderung memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi yang detail dan terukur, hampir seluruh negara *low-income* menggunakan pendekatan *data agregat* dalam teknik estimasinya (Rosid, 2016).

Di Indonesia, realisasi penerimaan pajak beberapa kali dibawah target. Misalnya, untuk tahun anggaran 2014, realisasi penerimaan pajak adalah sekitar 92 persen. Sementara, untuk tahun anggaran 2015, realisasi pajak diperkirakan hanya dikisaran 85 persen dari target.



Sumber : tirta.id

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat Tahun 2004-2015

Berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengenaan Pajak Badan ke Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 25 s.d 27 Februari 2016, salah satu pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir ini selalu berhasil menembus target penerimaan pajak yang di targetkan. Berbeda dengan pemerintah pusat yang pada tahun 2009 - 2015 ini tidak pernah tercapai penerimaan pajaknya.

Tabel 1.1 Perbandingan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2011	6.881.000.000.000	7.298.242.129.260,52	106,06%
2	2012	7.733.400.000.000	7.816.990.832.387	101,08%
3	2013	8.598.000.000.000	9.404.933.622.357	109,39%
4	2014	11.007.945.243.621	11.517.684.926.166	104,63%
5	2015	12.348.880.000.000	12.563.985.140.193	101,74%

Sumber : Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengenaan Pajak Badan ke Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 25 s.d 27 Februari 2016

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah Propinsi Jawa Timur selalu menembus target yang ditentukan. Realisasi penerimaan pajak daerah kurun waktu antara 2011 – 2015, tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 109,39% dan penerimaan terendah pada tahun 2012 sebesar 101,08%. Seolah berbanding terbalik dengan salah satu kabupaten yang berada diwilayah Propinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Sumenep yang dalam kurun waktu empat tahun terakhir tahun 2013-2016 gagal mencapai target yang ditentukan. Padahal Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 10 wilayah penyumbang *lifting* gas terbesar nasional di Semester 1-2016 dengan nomor urutan ke-7 dengan produksinya 39.000 boepd (Yt, 2016).

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten di Madura yang memiliki PAD paling besar. Namun jika kita melihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.07 /2016 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Sumenep

merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai indeks kapasitas fiskal : 0,13 yang termasuk kategori rendah. Dalam peraturan tersebut terdapat 4 (empat) kategori indeks kapasitas fiskal : (i) indeks ≥ 2 termasuk kategori sangat tinggi (ii) $1 \leq \text{indeks} < 2$ termasuk kategori tinggi (iii) $0,5 < \text{indeks} < 1$ berarti termasuk kategori sedang (iv) indeks $\leq 0,5$ berarti berarti kategori rendah. Dengan indeks kapasitas fiskal sebesar 0,13, menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki kemandirian keuangan yang rendah dan ketergantungan transfer dari pemerintah pusat relatif tinggi.

Dengan kemandirian fiskal yang rendah menyebabkan Kabupaten Sumenep kurang luasannya dalam menentukan inisiatif program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya serta belum mampu menjamin terwujudnya keberlangsungan program penganggulangan kemiskinan daerah (Sadik, 2014). Berikut tabel tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sumenep selama periode tahun 2006-2015 ditunjukkan dengan besarnya kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah dalam APBD.

Tabel 1.2 Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2006-2015

NO	TAHUN ANGGARAN	PENERIMAAN PAD (Rp.)	PENERIMAAN APBD (Rp.)	KONTRIBUSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2005	32.964.576.356,47	515.120.611.810,47	6,40
2	2006	38.991.458.833,70	608.391.640.128,28	6,41
3	2007	41.566.027.660,56	689.299.247.552,56	6,03
4	2008	44.178.604.068,09	748.233.939.789,09	5,90
5	2009	44.292.310.516,41	814.546.676.068,41	5,44
6	2010	46.702.756.751,92	953.403.305.809,92	4,90
7	2011	57.940.353.705,10	1.147.757.600.881,10	5,05
8	2012	85.886.851.769,04	1.338.898.292.216,04	6,41
9	2013	34.013.213.790,63	656.975.779.556,63	5,18
10	2014	162.371.865.154,17	1.647.362.227.719,17	9,86
11	2015	172.687.320.521,34	1.952.700.349.515,34	8,84
Rata-rata		69.235.939.920,68	1.006.608.151.913,36	6,88

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, Laporan Realisasi Penerimaan APBD beberapa tahun terbitan (data diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumenep selama tahun 2006 - 2015 yaitu 6,88%. Kemampuan keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 9,86% dan terendah 2010 sebesar 4,90%. Berdasarkan rata-rata kontribusi PAD Kabupaten Sumenep selama tahun 2006-2015 menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai tingkat kemampuan fiskal yang rendah dan mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan di daerah.

Untuk mengetahui sejauhmana peningkatan itu terjadi perlu dibuat pengkajian mengenai penerimaan PAD dari jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Sumenep. PAD dari jenis pajak daerah perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan secara maksimal. Menurut informasi dari Badan Pendapatan Kabupaten Sumenep penentuan target selama ini dengan berpedoman terhadap target pencapaian tahun anggaran sebelumnya. Padahal potensi pajak daerah secara riil tidak pernah dihitung dengan objektif, alasannya terlalu sulit menghitungnya karena membutuhkan data pendukung yang banyak, sedangkan banyak data yang tidak ada pada dinas terkait. Pertumbuhan dan kontribusi hasil pajak daerah terhadap PAD selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

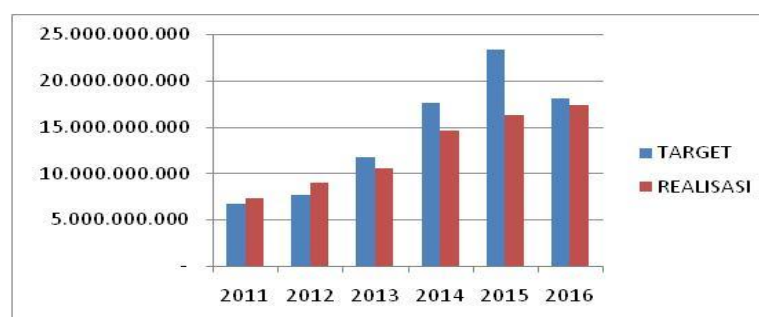
Tabel 1.3 Pertumbuhan dan Kontribusi Hasil Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Sumenep Tahun 2006 – 2015

NO	TAHUN ANGGARAN	HASIL PAJAK DAERAH (Rp.)	PAD (Rp.)	PERTUMBUHAN (%)	KONTRIBUSI (%)
1	2011	7.365.871.595,00	57.940.353.705,10	-	12,71
2	2012	9.064.183.146,00	85.886.851.769,04	23,06	10,55
3	2013	10.564.664.181,00	97.052.073.113,06	16,55	10,89
4	2014	14.513.053.554,55	162.371.865.154,17	37,37	8,94
5	2015	16.288.416.559,00	172.687.320.520,36	12,23	9,43

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, Laporan Realisasi Penerimaan APBD beberapa tahun terbitan (data diolah)

Seorang pakar dari *The World Bank* (Cochrane, 1983) menyatakan batas minimum perolehan Pendapatan Asli Daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah 20%. Apabila PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan suatu daerah. Semakin tinggi PAD terhadap penerimaan daerah dalam APBD, semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (B.Nusi, 2005; Yunanto, 2010). Menurut Hali (2016) keberhasilan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah di bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah.

Mengingat sangat pentingnya pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah daerah Kabupaten Sumenep harus memperhatikan penerimaan pajak potensial. Namun jika kita melihat dari gambar grafik 1.1 dapat kita lihat selama tiga tahun terakhir pajak daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2013 realisasi pajak daerah sebesar 89,61%, tahun 2014 realisasi pajak sebesar 82,39 % dan pada tahun 2015 menurun dratis menjadi 69,38%.



Gambar 1.2 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 2016

Menurut Suhendra (2016) rendahnya realisasi penerimaan pajak disebabkan banyak faktor diantaranya target yang terlalu tinggi, kurangnya aparat, hingga lemahnya aturan pendukung. Selain itu, ada faktor ekonomi global yang membuat beberapa pemasukan pajak angkanya menurun drastis. Menurut Siddiquee et al. (2012) bahwa ada kecenderungan dari pemerintah daerah untuk menetapkan target pendapatan yang bersumber dari PAD lebih rendah walau realisasi tahun sebelumnya dan terkadang para Kepala Daerah lebih senang mencari dana dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan menggali potensi PAD. Mardiasmo et al. (2000) menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Kenaikan target pajak daerah Kabupaten Sumenep dari tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Kenaikan Target Penerimaan Pajak Kabupaten Sumenep tahun 2012-2015

No	Jenis Pajak Daerah	2012	2013	2014	2015
1	Pajak Hotel	21%	30%	10%	30%
2	Pajak Restoran	295%	30%	24%	172%
3	Pajak Hiburan	18%	30%	15%	30%
4	Pajak Reklame	21%	30%	15%	30%
5	Pajak Penerangan Jalan	8%	30%	36%	30%
6	Pajak Air Tanah		30%	8%	30%
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	34%	30%	0%	30%
8	Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	3%	30%	163%	33%
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				23%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sumenep, Laporan Realisasi Penerimaan APBD beberapa tahun terbitan (data diolah)

Berdasarkan data diatas, kenaikan target pajak terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu pajak restoran sebesar 295 %, sedangkan penurunan target pajak terbesar terjadi pada tahun 2014 pada pajak restoran sebesar 0% atau besarnya target pajak antara tahun 2013 atau 2014 adalah sama. Pada tahun 2013 semua pajak mengalami kenaikan yang sama yaitu sebesar 30%. Pada tahun 2014 hanya terdapat satu pajak yang tidak mengalami kenaikan target pajak yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan, sedangkan jenis pajak yang mengalami kenaikan target pajak terbesar adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 163%. Tahun 2015 target pajak terbesar adalah pajak restoran sebesar 172%, enam jenis pajak mengalami kenaikan sebesar 30%. Sedangkan dua pajak lainnya yaitu Pajak BPHTB naik 33% dan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan naik 23%.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa data yang dibutuhkan oleh Bidang Pendapatan dalam rangka menetapkan target masih sangat terbatas dan dinilai belum akurat. Hal ini karena keterbatasan anggaran dan juga sumberdaya manusia dalam rangka melakukan pendataan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan permasalahan diatas maka pemerintah daerah Kabupaten Sumenep memerlukan sebuah solusi untuk memperkirakan besaran penerimaan pajak daerah. Solusi tersebut diharapkan dapat untuk membantu pemerintah daerah untuk memperkirakan besaran target pajak daerah sehingga besaran target tidak lebih rendah atau terlalu tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.

Kegiatan peramalan, disebut juga proyeksi atau prediksi, dilakukan oleh hampir setiap orang, baik itu pelaku bisnis, pejabat pemerintah, atau orang awam. Dengan melakukan *forecasting* suatu badan atau seseorang dapat

mempunyai pandangan lebih dalam melakukan perencanaan kegiatan-kegiatan atau dalam menetapkan anggaran di tahun berikutnya (Sri, 2012).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI) dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memprediksi jumlah penerimaan pajak daerah dengan memadukan antara teknologi dan teori. Adanya pemanfaatan TI ini diharapkan muncul berbagai cara dan solusi untuk mengatasi dan meminimalisir kesulitan dalam mengidentifikasi data penerimaan pajak daerah tersebut, diantaranya dengan menggunakan metode pada teknik *Data mining* (DM).

Data mining merupakan proses penemuan otomatis pola dalam set data dengan menggunakan teknik komputasional campuran dari statistik, pembelajaran mesin, dan pengenalan pola. Adapun pekerjaan yang berkaitan dengan *data mining* terdapat empat kelompok yaitu : model prediksi (*prediction modelling*), analisis cluster (*cluster analysis*), analisis asosiasi (*association analysis*), dan deteksi anomali (*anomaly detection*) (Prasetyo, 2014). Dalam menentukan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep, maka model yang kita gunakan adalah model prediksi. Terdapat dua jenis model prediksi, yaitu klasifikasi dan regresi. Peramalan penerimaan pajak daerah ini termasuk dalam kategori regresi karena terdapat nilai seri waktu (*times series*) yang harus didapatkan untuk mendapatkan target nilai akhir. Adapun metode yang akan digunakan dalam model prediksi atau peramalan *least square*, *ARIMA* dan *neural network*, pemilihan ketiga metode tersebut berdasarkan pola data perjenis pajak daerah Kabupaten Sumenep.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah menggunakan metode *least square*, *ARIMA* dan *neural network* untuk melakukan prediksi.

Penelitian Hansen and Nelson (1997) menunjukkan bahwa metode *neural network* lebih baik dari pada dua metode lainnya yaitu *eksponensial smoothing* dan *ARIMA*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hill et al. (1994) dan Hill et al. (1996), yang menemukan bukti positif secara umum dari nilai peramalan *time series* dari *neural network*, penelitian ini membuktikan potensi dan pentingnya *neural network* untuk peramalan pendapatan. Ini menyoroti keberhasilan dan keterbatasan menggunakan *neural network* untuk membuat proyeksi pendapatan.

Penelitian dari Hadiyat and Suhartono (2014) membandingkan antara metode *ARIMA* dan *neural network* untuk meramalkan data siklus frekuensi flare, hasil perbandingan ketepatan peramalan menunjukkan *neural network* lebih baik daripada *ARIMA* dalam memberikan nilai peramalan. Hasil kajian Machmudin and Ulama (2012) model *neural network backpropagation* memberikan model yang cukup baik daripada model *ARIMA*, dan dapat dikembangkan pada model *neural network* lainnya. Penelitian Ma'rufah et al. (2013) yang meramalkan pendapatan bunga dari bank BRI dan Bank BCA menunjukkan bahwa metode *neural network* lebih baik dari pada metode *ARIMA* dalam meramalkan pendapatan bunga BCA.

Penelitian lain dari Zain et al. (2009) dari dua pendekatan pemodelan, *regresi linear* dan *neural network* yang diterapkan untuk memprediksi nilai minimum dari kekasaran permukaan menunjukkan bahwa teknik *neural network* memberikan prediksi yang lebih baik terhadap kekasaran permukaan dibandingkan hasil metode regresi. Penelitian Hájek and Olej (2010) menunjukkan SVM dan FFNN telah terbukti menjadi metode yang tepat untuk memprediksi pendapatan kota, karena mereka dapat belajar, menggeneralisasi

dan memodelkan hubungan non-linier sambil mempertahankan kecepatan dan ketangguhan perhitungan.

Dan penelitian yang tidak sejalan juga didapat dari penelitian Ma'rufah et al. (2013) yang menunjukkan bahwa metode *ARIMA* lebih baik dari pada metode *neural network* dalam meramalkan pendapatan bunga BCA. Hasil penelitian lain yang juga tidak sejalan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian Gunaryati and Suhendra (2015) yang menunjukkan bahwa analisis *time series* yang sederhana menghasilkan prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lain yang lebih baik. Dalam hal ini metode *ARIMA* lebih baik daripada metode *neural network*. Penelitian Ma'rufah et al. (2013) meramalkan pendapatan operasional bank umum bank BRI dan BCA, menunjukkan metode *ARIMA* memiliki keakuratan yang paling sesuai untuk meramalkan pendapatan operasional bank BRI.

Penelitian Yanuar (2016) yang meramalkan pendapatan retibusi uji kendaraan bermotor menggunakan metode *least square* dan *double exponential smoothing* menunjukkan bahwa metode *least square* lebih baik dari pada *double exponential smoothing*. Selanjutnya penelitian Melynda (2012) yang mencari metode untuk direkomendasikan pada perusahaan sesuai dengan strategi pemasaran yang akan ditetapkan. Dari tiga metode yang digunakan yaitu, *simple moving average*, *simple linear reggresion*, dan *ARIMA*. Metode *ARIMA* (7,1,0) untuk strategi pemasaran fluktuatif dan metode *simple linear regression* untuk strategi pemasaran kenaikan konstan. Metode yang direkomendasikan untuk diterapkan perusahaan ke depan adalah metode *least square* untuk mengakomodir lebih jauh faktor-faktor kualitatif lain yang relevan pada strategi pemasaran, untuk memastikan akurasi ketersediaan barang jual.

Melihat hasil riset dari beberapa penelitian diatas, maka dapat dikatakan bahwa metode *least square*, *ARIMA* dan *neural network* dapat digunakan untuk melakukan peramalan pendapatan. Akan tetapi, dalam pemerintah daerah untuk menentukan besarnya target penerimaan pajak daerah masih menggunakan prosentasi dan masih jarang yang menggunakan metode peramalan. Serta pentingnya menghitung target penerimaan pajak agar tidak jauh dari realisasi, sehingga tidak menjadi utang terkait dilaksanakannya sistem akrual. Hal ini menjadi alasan mengapa peramalan pajak daerah merupakan sebuah tema menarik untuk dilakukan penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai peramalan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan metode *Least Square*, *ARIMA* dan *Neural Network*. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode peramalan, Objek penelitian yang digunakan, yaitu metode *Least Square*, *ARIMA* dan *Neural Network*. Alasan dipilihnya ketiga metode tersebut karena berdasarkan pola data perjenis pajak daerah Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Penelitian

Pentingnya penerimaan pajak sebagai pendapatan pemerintah pusat dan daerah dapat terlihat pada penyusunan APBN/APBD. Dimana dalam penyusunan APBN/APBD wajib membuat perkiraan-perkiraan/asumsi penerimaan pendapatan termasuk didalamnya adalah penerimaan pajak.

Setiap tahun BPPKAD membuat target penerimaan pajak yang akan dimasukkan dalam penyusunan APBD. Selama ini dalam menentukan target dengan menaikkan sekian target dari tahun lalu. Hal ini tentunya sangat tidak tepat karena belum tentu semua pajak daerah tahun lalu memenuhi target yang

ditentukan. Maka selisih antara realisasi dan target akan semakin jauh. Dengan demikian, dibutuhkan sistem prediksi penerimaan pajak daerah yang lebih akurat dalam memprediksi penerimaan pajak daerah. Adapun rumusan dari penelitian ini adalah :

1. Diantara metode *Least Square*, *ARIMA* dan *Neural Network*, metode manakah yang merupakan metode terbaik untuk memproyeksikan penerimaan pendapatan perjenis pajak daerah di Kabupaten Sumenep ?
2. Berapa besar proyeksi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep untuk periode satu tahun kedepannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Mencari metode Peramalan yang paling baik diantara metode *least square*, *ARIMA* dan *neural network* untuk memproyeksikan penerimaan pendapatan perjenis pajak daerah di Kabupaten Sumenep dengan membandingkan tingkat kesalahan (error) yang didapat dari masing-masing metode tersebut.
2. Untuk mengetahui berapa besar proyeksi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumenep untuk periode satu tahun kedepannya

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat lebih membantu para praktisi dan lembaga pemerintah dalam melakukan penghitungan prediksi penerimaan pendapatan pajak daerah khususnya BPPKAD dan SKPD terkait dalam

upaya mengetahui potensi penerimaan pajak untuk periode mendatang dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan pajak khususnya dalam menyusun penentuan target pajak daerah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan kemampuan khususnya yang terkait dengan peramalan menggunakan metode *least square*, *ARIMA* dan *neural network* khususnya peramalan pendapatan pajak.
3. Sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai peramalan pendapatan pajak dengan menggunakan metode *least square*, *ARIMA* dan *neural network*.